

Artikel Laporan Penelitian
Dana Rutin Unand 2000/2001
No. Kontrak : 01/RUTIN/VI/2000

DARI NKK/BKK KE ERA REFORMASI :
STUDI TENTANG GERAKAN MAHASISWA
DI SUMATERA BARAT 1978-1999

OLEH :

Drs. Zaiyardan Zubir, M. Hum. (Ketua)
Dra. Ramadhani Gaftar, M. Hum.(Pembimbing)
Harry Effendi (Anggota/mahasiswa)

Fakultas Sastra Unand



Departemen Pendidikan Nasional
Fakultas Sastra Universitas Andalas
Padang, 2000

ABSTRACT

This research is focused on students movement in the period of bringing into bear upon NKK/BKK to "reformation" era, especially in West Sumatra. Students as an indispensable part of the society have tried to uncover their character by putting themselves into action, particularly to protest despotism, and to hold a demonstration. In this province when NKK/BKK was exercised to incite, to restrict, and to induce students in order not to resist government policy, therefore this 'technique' was strongly effective to them. In effect, from 1978 to 1997 the dynamics of students activities were rather piled up in forms of arts, Boy Scouts, Resimen Mahasiswa (students with military discipline), etc. Therefore, both students protest and moral force disappeared for a quite long time. This type of exercise of power by bureaucrats was recognized as successful firm. Nevertheless, in early 1998 students movement suddenly erupted to stop Soeharto's acceptance.

The method used in this study is that of qualitative. This is to sharpen the analysis, the writer uses historical method: heuristics, critics, interpretation and historiography. The common platform of this qualitative and historical method is on heuristics. For the study is contemporary history, the technique of interview is the important means, the writer had interviews with the doers of the event.

The progress of students force in West Sumatra has its raise and fall. When "angkatan 66" came into being, this region had highly dynamism of students action, but since 1978 it turned into decline. Students movements has already risen in West Sumatra in "reformation" era, they have been brought into action through demonstration. One of its climax was student action held in front of governor office. It was estimated that there were more and less 80.000 students set about assembling from many universities in West Sumatra.

Collapse of Orde Baru (New Order) was also followed by the collapse of students resistance in West Sumatra. Some students movements emerging have shown disparate end if we compare it before the collapse of New Order. Even if in the end of this regime, students movements still introduced their idealism as a moral force, but since Soeharto has finished there has obviously been an indication that students movement has been seduced by other interests especially by money politics.

Key words: students movement

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Era 1980-an dan era 1990-an yang dikenal dengan era stabilitas politik dan pembangunan ekonomi oleh pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk memperbaiki tatanan yang telah "diselewengkan" oleh kepemimpinan Presiden Soekarno di masa Orde Lama. Sistem politik yang dibangun pada masa pemerintahan Orde Baru adalah "Politik Dosomoeko (Subagio Sasmito Satono, 1998), dengan tampilan sepuluh wajah yaitu: kedaulatan rakyat dirampas, Pancasila dijadikan tameng kekuasaan, hukum dikangkangi, parpol dan serikat buruh di pasung, parlemen dikebiri, ekonomi berwajah Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Monopoli (KKNM), kebudayaan diseragamkan, nilai kemanusiaan dijinakkan, pers dimandulkan, dan pendidikan dijinakkan. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya Malapetaka 15 Januari 1974 (Arbi Sanit, 1999).

Implikasi praktik politik dari peristiwa Malari 1974 terhadap perguruan tinggi umumnya dan khususnya mahasiswa adalah dilakukannya pendekatan stabilitas politik dengan jalan diterapkannya depolitisasi kampus dengan pelaksanaan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) yang ditegaskan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Josoef No. 156/U/1978, yang menganggap semua bentuk aktifitas dan ekspresi politik di kampus tidak diizinkan kecuali acara berupa diskusi. Selain itu menempatkan rektor lewat pemantu rektor III sebagai pengontrol dan pengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan, Surat Keputusan Mendikbud No. 2/U/1978 dan No. 37/U/1978 menyatakan bahwa tidak mengizinkan Dewan Mahasiswa (DEMA) dan membatasi kegiatannya (Human Right Watch, 1998). Kegiatan mahasiswa dikurung hanya seputar kampus. Proses belajarnya dipercepat lewat Satuan Kredit Semester. Mahasiswa di intimidasi jika melakukan aksi menyuarakan aspirasi dan penderitaan rakyat terutama lewat tekanan *droup out* (DO) (Al Zastrow, 1998). Policy sistematis ini juga melarang interaksi antara organisasi intra universitas dengan organisasi ekstra universitas yang selama ini berfungsi aktif mem *back-up* nya (Nugroho Notosusanto, 19850).

Ketatnya pembinaan kegiatan non-akademik mahasiswa memberikan pengaruh yang kuat bagi keterbatasan untuk melakukan aktivitas politik moral. Kebekuan itu diatasi dengan mengkombinasikan perhatian kepada masyarakat bersama dengan kritis lewat pembentukan "Kelompok Studi" (KS). Selain itu juga mempraktekkan pemikiran kritis dalam memberdayakan masyarakat lewat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak akhir tahun 1970-an, yang berperan sebagai lembaga pembangunan alternatif dikalangan sebahagian kecil mahasiswa. Kelompok studi ini semakin berkembang pada era 1980-an dan tampil sebagai trend sekaligus format baru dalam aktifisme mahasiswa Indonesia. Dalam konteks inilah, akan dicoba disoroti gerakan mahasiswa di Sumatera Barat.

Dalam hal gerakan mahasiswa, di Sumatera Barat 1980-1996 juga di temukan KS di beberapa perguruan tinggi besar di Padang seperti Universitas Andalas (Unand), IKIP Padang, IAIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Bung Hatta (UBH) yang di antaranya adalah KSI (Kelompok Studi Islam), KS Rabbani, KS Almadani, KS Usroh yang menjadikan mesjid kampus sebagai tempat diskusinya. Selain itu juga muncul Kelompok Diskusi Mahasiswa (Kodim), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Sosial (LP2S), Kelompok Diskusi Cendikia

(KDC) dan Kelompok Studi Lingkar Kabisat (KSLK). Kelompok ini lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan mahasiswa dari keterkekangan aktivitas.

Tahun 1993 antara KS yang ada ini saling membuka diri sehingga terbentuklah Forum Komunikasi Mahasiswa Padang (FKMP). Setelah itu kelompok ini mengalami kegoyangan sehingga mengalami kemunduran. Tidak bisa eksisnya forum ini akhirnya pada tahun 1996 terbentuklah Yayasan Forum Amanat Rakyat (YFAR) yang diprakarsai oleh Ridwan Jamal, Miko Kamal, Rudi Rusli, Ichwan Mansur. Kemudian juga terbentuknya Lembaga Riset dan Advokasi yang pengurusnya mantan anggota FKMP. Lembaga ini dibentuk sebagai sarana untuk memperjuangkan idealisme yang tidak di dapatkan dalam lembaga formal perguruan tinggi.

Di lain pihak tahun 1994 dan 1995 aksi protes terhadap pemberlakuan format SMPT pun terjadi di UNAND. Mereka ingin merubah SMPT menjadi KMUA (Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas). Lahirnya lembaga tersebut disebabkan oleh terjadinya perbedaan-perbedaan ditingkat aktifis mahasiswa ataupun dengan pimpinan Perguruan tinggi (Eka Vidia Putra, 1999).

Bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sebagai gerakan bersama, di Sumatera Barat dimulai dengan aksi demonstrasinya yang pertama kali tanggal 18 Februari 1998 oleh mahasiswa IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang), kemudian disusul besoknya tanggal 19 Februari 1998, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa Cinta Rakyat (AMCR) yang dikoordinatori oleh Syahrul R. Tanjung mendatangi kantor DPRD TK 1 Sumatera Barat. Aksi kedua ini diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di Padang, seperti UNAND, IAIN, Universitas Bung Hatta, STIND, UMSB (Harian Umum Singgalang, Februari 1998). Mereka menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga bahan kebutuhan pokok rakyat. Transparansi dan optimalisasi pendistribusian sembako serta menindak tegas para spekulan. Gerakan-gerakan mahasiswa ini akhirnya melahirkan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat (FKMSB) dengan aksi pertamanya tanggal 14 April 1998 di Kampus Teknik Universitas Andalas Air Tawar Padang. Aksi ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa yang berasal dari UNAND, IKIP/UNP, Univ. Bung Hatta, IAIN Imam Bonjol, STTP dan UMSB (Harian Umum Singgalang, April 1998).

Apa yang melatar-belakangi terjadinya radikalisme gerakan mahasiswa di Sumatera Barat, yang semasa tahun 1980-an tidak begitu terdengar gaungnya. Bahkan mahasiswa Sumatera Barat sering dikirimi "pakaian dalam wanita", sebagai ungkapan bahwa mereka tidak memiliki militansi sebagai seorang mahasiswa. Pemikiran yang muncul adalah bahwa persoalan seperti ini cukup signifikan untuk diteliti lebih jauh agar dihasilkan gambaran yang lebih detail dan mendalam tentang gerakan mahasiswa di Sumatera Barat. Penulis berhipotesis bahwa gerakan mahasiswa di daerah ini memiliki dinamika, corak dan karakter tersendiri, yang berbeda dengan daerah lainnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Persoalan yang diteliti dalam tulisan ini adalah mengenai Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat Masa Orde Baru (1978-1999). Batasan waktu dari penelitian ini adalah sejak dimulainya dari diterapkannya NKK BKK di perguruan tinggi tahun 1978. Batasan akhir adalah lahirnya gerakan anti

Soeharto atau yang dikenal dengan gerakan reformasi 1998, sampai tumbanganya tokoh yang berkuasa selama 32 tahun itu.

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang menjadi sentral pendidikan tinggi di Sumatera Barat atau kota yang menjadi sentral gerakan yaitu kota Padang dan Bukittinggi. Padang yang memiliki beberapa perguruan tinggi seperti Unand, Bung Hatta, IAIN, STTP, UMSB, dan UNBRAH, sedangkan di Bukittinggi seperti STKIP, FKIP, dan STAIN. Untuk mempertajam analisis, maka rumusan persoalan adalah :

1. Bagaimana bentuk dan dinamika gerakan mahasiswa di Sumatera Barat masa penerapan NKK/BKK tahun 1978 sampai dengan SMPT tahun 1990.
2. Bagaimana bentuk dan dinamika gerakan menjelang meletusnya peristiwa 1 tanggal 21 Mei 1998
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya radikalisme dalam gerakan mahasiswa tahun 1998
4. Faktor yang mempengaruhi melemahnya gerakan mahasiswa.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian mengenai topik gerakan mahasiswa di Sumatera Barat bertujuan untuk :

1. Melihat dampak dari diberlakukannya BKK/NKK dalam dinamika kehidupan mahasiswa di Sumatera Barat.
2. Merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kelompok radikal dalam gerakan mahasiswa di Sumatera Barat
3. Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan mundurnya dinamika dalam gerakan mahasiswa di Sumatera Barat.

D. KERANGKA ANALISA

Gerakan mahasiswa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah gerakan yang dilakukan baik dalam bentuk non-action maupun action. Gerakan non-action seperti gerakan Kelompok Studi (KS) yang cenderung berfungsi sebagai " *information action*" dengan tujuan " *the distribution of critical information*" (Adi Sury Cula, 1998). Gerakan action adalah gerakan nyata seperti, demonstrasi, yang memiliki implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap persoalan yang sedang di hadapi, baik dibidang ekonomi, politik, hukum maupun social - budaya. Gerakan yang menginginkan perubahan dipelopori oleh para mahasiswa untuk mengubah sistim pemerintahan Orde Baru. Dari sistim pemerintahan yang otoriter dan berorientasi pada kelompok yang sedang memegang kekuasaan negara menjadi sistim pemerintahan yang demokratis. Menurut Sarlito gerakan mahasiswa adalah gerakan yang dilakukan bersama atau sendirian untuk mengkritik dan atau menentang suatu kebijakan yang dibuat oleh penguasa (Sarlito Wirawan Sarwono, 1978).

Gerakan mahasiswa pada hakikatnya merupakan gerakan moral dan dilandasi dengan nilai-nilai akademisi. Dalam konteks strategi, gerakan mahasiswa merupakan gerakan sadar dan sistimatis, bukan gerakan insidental dan

spontanitas. Gerakan ini lahir sebagai akibat dari pengkondisian dan penciptaan sistim pemerintahan yang sentralistik, otoriter, paternalistik, simbolistik dan formalistik dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya. Praktik pemerintahan Orde Baru yang cenderung melahirkan bentuk-bentuk kebijakan anti demokrasi dan mengabaikan partisipasi politik masyarakat. Mulai dari pengkerdilan partai-partai politik, organisasi masyarakat, depolitisasi perguruan tinggi, pembredelan pers. Menggunakan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, atau kebijakan politik lainnya yang nyata-nyata menganggangi kedaulatan rakyat. Menurut Ignas Kleden, semuanya itu tidak membuat mahasiswa Indonesia apolitis, tetapi mendorong mereka mencari jalan baru yang lebih inovatif dan imajinatif dalam melakukan aksi politiknya, sehingga Kleden menyebut mahasiswa sebagai "Wanderkinder Politik (anak-nak ajaib dalam politik).alam literatur ilmu politik memaparkan tiga pandangan teoritis tentang latar belakang lahirnya gerakan reformasi. Pertama, bahwa gerakan sosial itu timbul karena kondisi yang memberikan kesempatan (political opportunity) bagi gerakan. Kedua, bahwa gerakan sosial itu timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Ketiga, bahwa gerakan sosial adalah semata-mata kemampuan (leadership capability) dari tokoh penggeraknya (Al Chaidar, 1998). Disamping itu untuk mengamati gerakan reformasi mahasiswa ada tiga elemen penting yang mesti dicermati antara lain organisasi, ideologi, dan bentuk gerakan yang dilakukan (Anthony M. Drum, 1989).

E. METODE PENELITIAN DAN BAHAN SUMBER

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan sumber-sumber (primer dan sekunder). Langkah ini dalam metode ilmu sejarah disebut dengan heuristik (Louis Gottschalk, 1986). Kemudian dilanjutkan dengan kritik sumber yang terdiri dari kritik interen dan eksteren sehingga didapatkan data dan fakta yang otentik dan kredibel. Disamping itu juga harus dilakukan seleksi sumber/data (cross check) dari sumber yang telah didapatkan. Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dengan melahirkan sintesis dan analisis dari data dan fakta yang telah ada, sehingga dapat dilakukan penulisan sejarah yang dipertanggung jawabkan secara akademis.

Sumber primer yang didapatkan adalah bahan-bahan yang berhubungan langsung dengan peristiwa. Yaitu bahan-bahan yang merekam langsung peristiwa tersebut seperti media massa, foto, iklan, video dan arsip-arsip tertulis lainnya. Selain itu juga didapatkan dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut (Taufik Abdullah, 1988). Wawancara dapat dilakukan dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Seperti Aktifis Kelompok Studi yang ada pada tahun 1980an dan 1990-an seperti Makrufin Ihsan (SMI IAIN IB Padang), Indra G. Lubis dan Budi Kurniawan (SMPT UNAND), Pengurus YFAR (Yayasan Forum Amanat Rakyat) yang diketuai oleh Miko Kamal, FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat) diantaranya Syarli Mubarag (Ketum SMPT UNAND), Gun Sugianto (Ketua SMPT IKIP Padang), Nuzran (Ketum SMI IAIN IB Padang), Jhon Muklis (Ketum SMPT STTP Padang), dan Ahmad Khairuddin (Ketua SMPT Universitas Bung Hatta).

F. Pembahasan

1. Sumatera Barat Periode Awal Orde Baru

Lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 1967 merupakan babak baru bagi Pemerintahan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Terutama di bidang politik dan ekonomi. Bidang politik, pemerintah mengupayakan untuk menghilangkan trauma politik PRRI tahun 1958-1961 (Nofriyasan, 1988). Di bidang ekonomi, diberlakukannya sistem pemerintahan desa dan dihilangkannya sistem pemerintahan nagari lewat penerapan UU No. 5 Tahun 1979 dan Perda No. 13 Tahun 1983. Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah karena alasan pembangunan ekonomi. Dengan diterapkannya peraturan ini maka subsidi dana pembangunan dari pusat akan lebih besar (Mestika Zed, dkk, 1998: 258).

Semakin tinggi subsidi pembangunan daerah dari pusat juga untuk menunjang tingkat pertumbuhan dan perkembangan sektor pendidikan. Sejak tahun 1978/1979 sampai tahun 1986/1987 bantuan dana yang telah diberikan berjumlah Rp. 811.8 juta. Disamping itu juga sudah tercatat sebanyak 41 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) (Memori Azwar Anas, 1977/1982-1982-87: 238-240). Tentu saja peningkatan kuantitas lembaga pendidikan ini diiringi dengan peningkatan jumlah dosen, mahasiswa dan sarjana (lulusan). Pada tahun 1977 lulusan Perguruan Tinggi (sarjana) tercatat hanya sebanyak 1935 orang mengalami peningkatan menjadi 19.067 orang tahun 1997 (Sumatera Barat Dalam Angka, 1997: 85-86).

Disisi lain kebijakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tersebut tidak sejalan dengan pembangunan politik. Pemerintah cenderung menekan dan merontokkan kebebasan. Kebebasan masyarakat dipasung untuk berekspresi, termasuk di dalamnya masyarakat kampus. Perguruan tinggi dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan politik. Pemerintah memproteksi kebebasan akademik. Terutama bagi kalangan mahasiswa.

Mahasiswa sebagai sub-elemen dari dunia perguruan tinggi secara terpaksa harus menerima ketentuan dan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Momentum peristiwa Malari 1974 dijadikan sebagai kambing hitam pembubaran Dewan Mahasiswa sebagai lembaga kemahasiswaan yang menjadi wadah untuk mengakomodir aspirasi dan tuntutan perjuangan mahasiswa. Mereka harus mencoba beraktifitas dalam sebuah wadah baru dari hasil SK Mendikbud Daed Yusuf Nomor 156/U/1978 tanggal 19 April 1978 dan SK Nomor 2/U/1978 yang menyatakan bahwa tidak diakui lagi Dewan Mahasiswa sebagai lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi dan diganti dengan Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Fakultas. Semua aktifitas mahasiswa yang sebelumnya kebebasan tersendiri sekarang harus mengakui PR III sebagai penanggung jawab seluruh kekuatan kemahasiswaan (Majalah Mahasiswa, No. 8, 1978: 54-58). Tahun 1990 format tersebut dirubah lewat SK Mendikbud Nomor. 0457/U/1990 menjadi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (Margaret M. Palona, 1994: 101) Proses belajar dipercepat lewat Satuan Kredit Semester (SKS) dan dibungkam lewat pemberlakuan droup-out (DO) (Diro Antonga, 1998: 76).

Mahasiswa yang selama ini dianggap diam sebagai akibat dari penerapan sistem pendidikan terbantah sudah dengan terjadinya peristiwa monumental di tahun 1998. Dimana kekuatan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto akhirnya dapat digulingkan oleh mahasiswa itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya benar anggapan yang mengatakan gerakan mahasiswa dimasa pemberlakuan NKK/BKK (1978-1990) dan SMPT (1990-1998) lumpuh total. Akan tetapi tentu saja gerakan mahasiswa dalam batasan ini mengambil bentuk dan format yang berbeda dengan gerakan Angkatan 1908, Angkatan 1928 dan Angkatan 66. Untuk itu disini akan dipaparkan dinamika dan bentuk gerakan yang terjadi dalam dua fase tersebut, dan pucaknya di tahun 1998 yang dikenal dengan gerakan reformasi. Terutama yang terjadi di Sumatera Barat.

2. Fase NKK/BKK 1978-1990

Perubahan format lembaga mahasiswa dari Dewan Mahasiswa menjadi Badan Koordinasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi besar di Sumatera Barat Perguruan tinggi besar di Sumatera Barat tergolong relatif cepat menerima dan menerapkan kebijakan ini. Menurut Rektor Universitas Andalas Prof. Jurnal Kamil bahwa konsep NKK/BKK tidaklah mematikan dan melumpuhkan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan masih diberi kebebasan dalam batas-batas tertentu. Untuk menggiatkan mahasiswa maka dibentuklah unit-unit kegiatan kemahasiswaan (*Kompas*, 14 Maret 1987).

Dikalangan mahasiswa dan aktifis Dewan Mahasiswa di Padang, perubahan ini tidak mendapatkan tantangan yang berarti. Mahasiswa di Sumatera Barat lebih cenderung mengambil sikap diam dan tidak konfrontatif. Tindakan dan sikap mahasiswa ini dipengaruhi oleh trauma sejarah PRRI sehingga mentalitas generasi muda di Sumatera Barat tidak lagi progresif. Gerakan mahasiswa di awal pemberlakuan NKK/BKK tidak ada. Mereka lebih cenderung memilih untuk menamatkan perkuliahan secepatnya dan mendapatkan pekerjaan. (Wawancara dengan Alismarjo tanggal 15 Agustus 2000)

Di Universitas Andalas lembaga mahasiswa yang dibentuk berdasarkan ketetapan pemerintah tahun 1978 dikenal dengan nama Kordinasi Unit Kegiatan/ Badan Koordinasi Mahasiswa (KUK/BKK). Wadah ini dikoordinatori oleh PR III, sedangkan anggotanya terdiri dari Asisten PR III, PD III, dan utusan mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan hanya terpolo dalam bidang minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa. Di bidang minat bakat mahasiswa melakukan kegiatan yang dapat menunjang dan mengembangkan bakat mahasiswa dalam menari, olah vokal, teater, olahraga, musik dan drum band. Di Bidang penalaran, kegiatan yang sering dilakukan adalah berupa acara seminar, diskusi panel, lokakarya dan bedah buku. Sedangkan di bidang pengabdian masyarakat, kegiatan mahasiswa dapat dirangkai dalam bentuk Kemah Bakti Mahasiswa (KBM) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Wawancara dengan Yuliandri tanggal 23 Juli 2000)

Kegiatan mahasiswa di bidang minat dan bakat merupakan kegiatan yang cenderung mewarnai aktifitas kampus yang ada di Sumatera Barat. Yaitu kegiatan yang berupa acara pancat tebing, perlombaan di bidang olah raga seperti sepak bola, bola basket, badminton, karate, Silat, Taekwondo dan Bridge. Perlombaan ini umumnya memperebutkan piala Rektor dan Dekan. Begitu juga

dengan bidang kesejahteraan mahasiswa. Kegiatan ini sering sering dilakukan oleh unit kegiatan kepramukaan dan pecinta alam. Unit kegiatan ini di tahun 1980-an mengalami perkembangan dibandingkan dengan lembaga kemahasiswa seperti Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Fakultas.

Hal yang menarik lagi adalah di bidang musik. Di Tahun 1980-an perlombaan konser musik antar perguruan tinggi baik dalam skala regional dan nasional menjadi acara rutinan atau tahunan. Festival musik kampus telah menjadi acara khusus dan tetap dari setiap penutupan acara *student day*. Festival musik ini dikenal dengan "malam inugrasi". Sedangkan acara *Jumpa Musik Kampus* (Jamsika), *Gebyar Musik Kampus* (GMK) dan *Palanta Musik Kampus* (PMK) merupakan jenis kegiatan yang memperlombakan ajang kemampuan mahasiswa dalam olah vokal dan memainkan instrumen musik. Perlombaannya diikuti oleh satuan kelompok musik yang berasal dari kelompok musik tertentu, fakultas dan universitas. Walaupun kegiatan membutuhkan pendanaan yang cukup besar akan tetapi tidak menjadi kendala yang cukup berarti karena setiap kegiatan ini mendapatkan uluran tangan dari sponsor. Perusahaan yang sering menjadi sponsor utama berasal dari PT Soempurna, Gudang Garam, Marlboro, Djisamsoc dan Lucky Strike sehingga sewaktu acara berlangsung suasana kampus mirid dengan suasana "pameran". Kegiatan ini tidak jarang diwarnai dengan perkelahian antar mahasiswa dan antar kelompok mahasiswa. (Wawancara dengan Khairul Ikhsan, 30 Juli 2000)

Khusus di bidang penalaran, kegiatan ini mulai mengalami percepatan di akhir tahun 1980-an. Artinya ketika lembaga kemahasiswaan yang telah dikondisikan tidak lagi dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk bertikir bebas, mengkritik secara kritis dan mengeluarkan pendapat secara terbuka, maka mereka membentuk kelompok diskusi. Mereka menggunakan mesjid, lesehan kampus dan rumah kost sebagai tempat untuk berdialog. Mereka melakukan pengayaan pemikiran dan senantiasa membicarakan hal yang berkaitan dengan politik, agama, ekonomi, hukum dan isu sosial kemasyarakatan. Forum yang dibentuk bersifat nonformal sehingga kelompok ini belum terkoordinir dengan baik dan cenderung tidak memiliki nama yang permanen. Hasil dari dialog mereka hanya sebatas untuk mereka. Kelompok diskusi yang lahir seperti Kelompok Studi Islam (KSI), Forum Studi Islam (FSI), Kelompok Diskusi Cendikia (KDC), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Sosial (LP2S). (Wawancara dengan Edi Indrizal 15 Juni 2000)

3. Fase SMPT (1990-1998)

Fase ini merupakan fase lanjutan dari aktifitas kritis mahasiswa di akhir tahun 1980-an. Dalam fase ini kegiatan diskusi kritis tersebut mengalami proses percepatan dalam hal gerakan. Mereka tidak lagi sebatas diskusi akan tetapi sudah mulai aksi demonstrasi seperti yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat (FKMP), Yayasan Forum Amanat Rakyat (YFAR). Kedua wadah wadah ini sudah berbentuk Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang independen dan tergolong kepada kelompok yang militan. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya 3 orang tokoh aktifis mahasiswa yang berasal dari FKMP dan YFAR. Mereka diantaranya adalah Ridwan Jamal, Ichwa Mansyur dan Muhammad Abdi. Penangkapan ini

juga dipengaruhi oleh tingkat militansi gerakan yang dilakukan, gerakan yang dilakukan. Penangkapan terhadap tiga orang mahasiswa ini dilakukan di Kantor DPRD Sumatera Barat sewaktu melakukan gugatan (demonstrasi) dalam kasus Eddy Tansil tanggal 11 Mei 1996 (Harian Umum **Haluan**, 11 Mei 1996).

Terjadinya peristiwa penangkapan tersebut tidak begitu mempengaruhi dinamika gerakan masa sesudahnya. Malahan mereka semakin termotivasi untuk melakukan gerakan oposisi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan mereka untuk membentuk Komite Pengawas Pemilu Sumatera Barat (KIPP Sumbar) dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu tahun 1997. Anggota KIPP ini berasal dari anggota FKMP dan YFAR. Mereka melakukan pemantauan di beberapa TPS di Kota Padang. Hasil pemantau yang dilakukan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa pelaksanaan Pemilu tidak berjalan dengan tidak jujur, tidak adil dan demokratis karena banyaknya ditemukan kecurangan-kecurangan sewaktu kampanye, pemungutan dan penghitungan suara (Siaran Pers FKMP Tahun 1997). Setelah Pemilu 1997 selesai kelompok ini juga melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Sumatera Barat sewaktu berlangsungnya Sidang Paripurna dalam memilih Gubernur Sumatera Barat periode 1997-2002. (Wawancara dengan Budi Kurniawan, 15 Juni 2000).

4. Reformasi dan Radikalisasi Gerakan

Memasuki tahun 1998, dinamika gerakan mahasiswa mengalami perubahan dari "students movement" menjadi "social movement". Perubahan ini dipengaruhi kondisi ekonomi yang semakin parah dan diiringi dengan krisis kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Tanggal 19 Februari 1998, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa Cinta Rakyat (AMCR) mendatangi Kantor DPRD Sumatera Barat untuk menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok, melakukan transparansi dalam hal pendistribusiannya dan meminta ditindak tegas para spekulan (Harian Umum **Singgalang**, 20 Februari 1998).

Aksi-aksi mahasiswa terus mengalami peningkatan di bulan-bulan berikutnya. Wadah aksinyapun semakin luas dan besar seperti yang terjadi pada tanggal 20 April 1998. Aksi yang dimotori oleh wadah Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat ini dihadiri oleh Amin Rais dan diikuti oleh puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari Unand, IKIP, IAIN, UBH, STTP, dan UMSB yang bertempet di Kampus IKIP Air Tawar Padang. Dalam aksi ini mahasiswa Sumatera Barat mengajukan "petisi" yang meminta agar Wiranto Arismunandar mundur dari jabatannya sebagai Mendikbud kerana dianggap tidak pantas menyandang tersebut. Disamping itu juga meminta segera dilakukan reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya. (Harian Umum **Haluan**, 21 April 1998).

Konsekuensi logis dari gerakan mahasiswa yang selalu memperjuangkan kehendak rakyat menimbulkan lahirnya gerakan "people power". Ribuan rakyat yang terdiri dari pelajar, preman dan stoker angkutan umum ikut bergabung ke dalam barisan gerakan mahasiswa yang mengakibatkan terjadi aksi kerusuhan dan pengrusakan sehingga mengakibatkan kota Padang menjadi "kota mati". Peristiwa ini terjadi dua kali. Peristiwa pertama terjadi tanggal 7 Mei 2000. Peristiwa ini terjadi pada hari hari Kamis jam 15.00 WIB mengakibatkan rusaknya 1 unit mobil

mobil DPD Golkar, musik room PT Elang Perkasa, Gedung BCA, Kantor Sueofindo, Show Room Isuzu Bimantara, dan Bioskop Padang Teater Aksi ini menimbulkan kerugian sekitar Rp. 750 juta. (Harian Umum Singgalang, 8 Mei 1998). Sedangkan aksi kedua terjadi pada tanggal 15 Mei 1998. Aksi ini terjadi setelah shalat Jumat yang mengakibatkan terbakarnya Damar Plaza, Lucky Musik Room, Hotel Nuansa, Gudang Indomie di Jalan Klateng, gudang Sony di Jalan di Jalan Batang Arua, dua petak rumah ruko di Jalan Nipah, Show Room Sepeda Motor Yamaha, CFC di Permindo, 14 unit mobil dan 6 sepeda motor. Peristiwa kedua ini tidak saja terjadi di Padang akan juga terjadi di Payakumbuh (Harian Umum Haluan 16 Mei 1998).

Aksi pendudukan tempat-tempat vital, penggerakan massa besar-besaran, penurunan bendera setengah tiang di Makorem, dan pengepungan (penyanderaan) terhadap pejabat pemerintahan merupakan strategi gerakan yang cenderung mereka lakukan. Sekitar 6000 mahasiswa UBH mendatangi dan menduduki Kantor DPRD Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2000. Aksi yang dikomandoi oleh Ahmad Khairuddin ini menuntut bahwa masyarakat Sumatera Barat mendesak dilaksanakan SI MPR dan mencabut cabut mandat Soeharto sebagai Presiden RI (Harian Umum Singgalang, 19 Mei 1998). Aksi pendudukan juga terjadi di RRI Padang tanggal 19 Mei 1998 oleh mahasiswa Unand. Aksi yang dikoordinir oleh Ketua SMPT Unand Syarli Mubaraq meminta agar disiarkannya pesan-pesan reformasi mahasiswa Sumatera Barat. Pesan yang ditujukan kepada masyarakat luas tersebut berbunyi antara lain, bahwa gerakan reformasi adalah gerakan anti kekerasan dan kerusakan, perjuangan reformasi adalah perjuangan kedaulatan rakyat, dan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan kedamaian serta tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak benar. Disamping itu pesan tersebut juga berisikan tanggapan yang menyatakan menyambut baik niat Soeharto untuk mengundurkan diri dari Presiden RI dan mendesak secepatnya dilaksanakan SI MPR (Harian Umum Singgalang, 20 Mei 1998). Besoknya, sekitar 100.000 mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Barat tanggal 20 Mei 1998. Mereka melakukan long march dari masing-masing kampus dan menuju Kantor Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Demonstrasi terbesar ini berhasil menghadapkan Gubernur Mukhlis Ibrahim dan Ketua DPRD Sumatera Barat Nurbari Pamuncak dihadapan para demonstran yang tidak hanya berasal dari Padang juga diikuti oleh utusan mahasiswa ASKI Padang Panjang, STAIN Bukittinggi dan UMMY Solo. Mereka mengeluarkan satu tuntutan yaitu meminta Soeharto mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi ini merupakan aksi terbesar disepanjang sejarah gerakan mahasiswa di Sumatera Barat. (Harian Umum Haluan, 21 Mei 1998)

Aksi pendudukan kembali terjadi pasca kejatuhan Soeharto sebagai Presiden RI. Pendudukan Kantor DPRD Sumatera Barat dilakukan disebabkan oleh tidak responnya pemerintahan transisi dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie terhadap sikap penolakan elite masyarakat Sumatera Barat atas keberadaan Hasan Basri Durin sebagai Menteri Agraria/Kepala BPN. Hasan Basri Durin dianggap tidak pantas menduduki jabatan tersebut karena sewaktu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat telah melakukan praktek KKN. Kelompok mahasiswa yang berasal dari Unand, IKIP, UNES, ATIP, STAI-YKI, KAMMI, GMPI, dan GPI mendatangi dan mendudukinya tanggal 25 Mei 1998. Mereka menuntut agar DPRD Sumatera Barat mau menandatangani naskah pernyataan

sikap yang isinya meminta mundur Hasan Basri Durin dan Walikota Padang Zuiyen Rais dari jabatannya. Tuntutan mahasiswa ini akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumatera Barat Noerbari Pamuncak tanggal 25 Mei 1998. Penandatanganan ini disaksikan oleh Danrem 032 Wirabrata Kolonel (Kav) Soegiono, Wakil Ketua DPRD Surya Warsilah dan Darmadi dan Dandim 0312 Lekol (Art) Mustiko Budi. Setelah ditandatangani naskah tersebut langsung di kirimkan ke Presiden B.J. Habibie dan ditembuskan ke Menpan, Ketua DPRD RI, Kajati dan Kapolda Sumatera Barat. (Harian Umum Singgalang, 26 Mei 1998). Selain mendatangi DPRD Sumatera Barat mereka juga mendatangi Kantor Kajati dan Kantor DPRD Kota Padang

Tuntutan untuk meminta Walikota Padang Zuiyen Rais untuk mundur sebenarnya telah muncul tanggal disaat terjadinya kerusuhan tanggal 15 Mei 1998. Tuntutan ini disuarakan oleh kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Hukum Untuk Reformasi (AMHUR) yang kemudian berubah nama menjadi Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) Mereka mendatangi dan menduduki kantor DPRD Kota Padang (Harian Umum Singgalang, 16 Mei 1998). Kedua tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari Kajati Sumatera Barat. Kajati Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor R.83.031.OP.1/05/1998 tanggal 28 Mei 1998 yang mendesak Mendagri untuk menonaktifkan Mukhlis Ibrahim sebagai Gubernur Sumatera Barat dan Zuiyen Rais sebagai Walikota Padang karena alasan KKN. (Harian Republik, 29 Mei 1998).

Walaupun tuntutan tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan namun hasilnya tetap saja belum terwujud. Kenyataan inilah yang menimbulkan reaksi emosional dikalangan mahasiswa. Tanpa pikir panjang mereka menyendera Hasan Basri Durin sewaktu menghadiri acara diskusi panel yang dilaksanakan oleh ICMI Sumatera Barat tanggal 27 Agustus 1998 di Rektorat IKTP Padang (Harian Kompas, 28 Agustus 1998) dan peminaan terhadap Mentan Saleh Salahuddin di Bandara Tabing tanggal 19 September 1998 (Harian Kompas, 20 September 1998).

Selain isu KKN, penghapusan terhadap peran Dwifungsi ABRI merupakan keinginan dan cita-cita perjuangan reformasi mahasiswa. Antipati mahasiswa terhadap ABRI disamping pengaruh peran sosial-politiknya, juga disebabkan oleh tindakan pihak keamanan yang senantiasa menggunakan tangan besi dalam menghadapi gerakan mahasiswa. Sehingga tewasnya beberapa orang mahasiswa seperti yang terjadi dalam kasus "tragedi Trisakti" dan "tragedi Semanggi". Melihat kenyataan ini sekitar seribu mahasiswa yang berasal dari UBH mendatangi Makorem 032 Wirabrata dan Markas Batalyon 133 Yudhasakti tanggal 14 September 1998. Mereka protes terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan tewasnya beberapa orang mahasiswa. Mereka langsung memasuki halaman Makorem untuk menurunkan bendera setengah tiang sebagai bukti belasungkawa. Tindakan ini memicu terjadinya bentrokan yang mengakibatkan beberapa orang mahasiswa luka-luka. (Harian Umum Haluan, 15 September 1998) Begitu juga dengan aksi keprihatinan yang dilakukan oleh mahasiswa Unand. Mereka melakukan mimbar bebas di depan kantor Danrem setelah selesai melakukan aksi di RRI Padang. Mereka menuntut segera cabut peran Dwifungsi ABRI dan usut tuntas kasus penembakan mahasiswa tersebut (Harian Umum Singgalang, 15 September 1998)

5. Pasang Surut Gerakan

Memasuki tahun baru 1998 gerakan mahasiswa mulai mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan terjadinya polarisasi tingkat gerakan mahasiswa. Antara kelompok yang menolak Presiden B.J. Habibie dengan kelompok yang mendukung. Atau antara kelompok yang mendukung SI MPR dan Pemilu 1999 dengan kelompok yang menolak SI MPR dan Pemilu 1999. Gerakan mahasiswa menjelang dan pasca pelaksanaan SI MPR cenderung sendiri-sendiri sehingga komunikasi dan koordinasi tidak lagi terjalin (Wawancara dengan Husni Kamil Manik, 15 Agustus 2000).

Stagnannya gerakan mahasiswa secara nasional, khususnya di Sumatera Barat semakin kelihatan menjelang pelaksanaan Pemilu tanggal 7 Juni 1999. Mahasiswa cenderung mengikuti kegiatan pembekalan pemaataan pemilu (voter education) dibandingkan dengan aksi oposisi. Mereka mengikuti pembekalan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh UNFREL, Forum Rektor, KIPP dan APPI Sumatera Barat. Keikutsertaan mereka dipengaruhi banyak faktor seperti untuk mendapatkan imbalan (honor) yang mengimangi para relawan dan ingin benar-benar mensukseskan Pemilu agar berjalan dengan jujur adil dan demokratis. Sehari pemantau relawan mendapatkan honor berkisar dari Rp. 25.000 sampai 60.000. (Wawancara dengan Teddy Alfonso, 25 September 2000)

Faktor lain yang menyebabkan semakin lemahnya gerakan mahasiswa adalah masuknya jadwal libur kuliah yang semakin mempengaruhi tingkat kesolidan gerakan. (Ungkapan keserharian mahasiswa di Sumatera Barat adalah pulang kampung setiap ada libur, baik libur 1 hari maupun libur 1 bulan). Disamping itu, juga muncul fraksi di tingkat elite mahasiswa, dan sikap skeptis dikalangan mahasiswa dari hasil perjuangan yang telah dicapai. Apalagi disaat terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke IV dari hasil SU MPR bulan Oktober 1999, karena hal ini terkait dengan ideologi gerakan mahasiswa i pada umumnya di motori oleh kelompok mahasiswa Islam (Zaiyandam Zubir, Jurnal Andalas, No. 30/September Tahun XI/1999)

F. Renungan Akhir

Setelah terbenam cukup dalam dalam peta gerakan mahasiswa di Indonesia, gerakan mahasiswa era Reformasi di Sumatera Barat sesungguhnya memperlihatkan gejala yang cukup menarik. Sejak 1980-an misalnya, mereka berada diluar peta gerakan mahasiswa. Namun sejak 1998 mahasiswa di Sumatera Barat sudah memperlihatkan kepeduliannya terhadap persoalan bangsa. Pada tahap ini, gerakan mahasiswa di Sumatera Barat dapat dikategorikan sebagai gerakan mahasiswa yang radikal. Radikalisme gerakan mahasiswa itu hanya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek.

Beberapa aktivitas nasional setelah jatuhnya Soeharto seperti Pemilu melibatkan mahasiswa didalamnya. Minimnya tokoh-tokoh mahasiswa dan rendah kelompok pemikir didalamnya mengakibatkan elite-elite mahasiswa secara langsung terjun kedalam kegiatan itu terutama menjadi pemantau Pemilu melalui APPI, KIPP, Forum Rektor, dan Anffel. Keterlibatan mereka dalam kegiatan ini secara drastis menggeser identitas mahasiswa, yang sebelumnya masih sebagai gerakan moral bergeser menjadi gerakan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mattulesi dan Djamatuddin Arceok, "Faktor-faktor Penyebab Gerakan Sosial Mahasiswa". 1997. (Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Unisa, No. 32: XVII/IV)
- Al Zastrouw, *Membedah Pemuda dan Mahasiswa: Reformasi Pemilihan Respon Kotemplatif Terhadap Persoalan Kehidupan dan Budaya*. 1998 (Jakarta: LKPS-1)
- Al Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total 1998* (Jakarta: Buku Islam Kaffah)
- Adi Surya Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah (1968-1998)*. 1998 (Jakarta, PT Raja Grafindo Pustaka)
- Anas Urbaningrum, *Kepeloporan Mahasiswa Tidak pernah Sia-Sia*. Dalam Fahrur Zaman Fadhy (ed), *Mahasiswa Menggugat : Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998, 1999* (Bandung: Pustaka Hidayat IKAPPI)
- Anthony M. Drum, *Introduction of The Body Politics* Prenticee, 1989, (Hall, Jew Jersey)
- Arbi Sanit, *Pergolakan Melakukan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*. 1999 (Yogyakarta: INSS7 Press Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III 548)
- Aswab Mahasin dan Isaud Naisir, *Cendekiawan dan Politik*. (Jakarta: LP3ES, 1983)
- Eka Vidia Putra, *Studi Tentang Gerakan Reformasi Mahasiswa di Sumatera Barat 1999*. Skripsi (Padang: Fakultas ISB Universitas Andalas)
- Delikson Munte, *Gerakan Mahasiswa: Studi Tentang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sumatera Barat 1996*. Skripsi. (Padang, Jurusan Sejarah Universitas Andalas.)
- Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978, 1994* (Golden Terayon Press)
- Isnat, *Peran HMI Dalam Aksi Menentang G30S/PMI di Kota Padang 1965-1968, 1997*. Skripsi. (Padang, Jurusan Sejarah Universitas Andalas).
- Murdan S. Widjojo, et al, *Penaklukan Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa 1998*. (Jakarta: Pustaka-Sinar Harapan, 1998)

Sarlito Wirawan, *Penimpin dan Aktifitas dalam Gerakan Protes Mahasiswa*,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Onghokham, *Analisa Kekuatan Politik Indonesia, Pilihan* Prisma, 1985,
(Jakarta: LP3ES)

Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik: Gerakan Kaum Muda di Sumatera Barat
(1927-1933)*, Terj. A.Gumilar dan Lirdiyanti, 1988, (Padang: Fakultas
Sastra Universitas Andalas)

Zayardani Zubir yang berjudul "Gerakan Mahasiswa dan Reformasi di Padang:
Suatu Analisis tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan",
dalam, *Jurnal Penelitian Abulhas*, September 1999

Surat Kabar Hutan

Surat Kabar Singgalang

Surat kabar Republika